

PENDIDIKAN ISLAM DALAM KRISIS MANUSIA MODERN (Perspektif Filsafat Perennial)

Sutikno

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: caksutikno3@gmail.com

Abstract: *This study focuses the Perennialism philosophy perspective of Islamic education in the crisis of modernity of wave of contemporary capitalism and liberalism. Crisis of modern man was rised since early periode of enlightenment caused by domination and ideologization of positivisim, rationalism and empirism those rised capitalism dan liberalism was forced by globalization machine that penetrates to whole of world territory. Those domination and ideologization centered to instrumental rationality based on ideological process to all aspects of human life. Islamic education in the crisis of modernity was qualitative research which used library research methods. Analise of this This study was philosophical and ideological approaches. Conclusion of this study that perenial perspective was an alternative solution in the crisis of modernity . Philosophically, perenial perspective was used as critical paradigm to deconstruct and reconstruct instrumental rationality in the modern paradigm capitalistically and liberalistically. In Islamic education, perenial perspective was a foundation of curricula construction through sociological and philosophical dialectics both in socio cultural structures or educational institutions.*

Keywords: *Islamic Education, Crisis of Modern Man, Perennial Philosophy*

Pendahuluan

Kemajuan kapitalisme dan neoliberalisme kontemporer menimbulkan dampak besar baik di bidang politik-ekonomi maupun sosial dan budaya serta keagamaan. Di Bidang politik-ekonomi, praktek kapitalisme dan neoliberalisme melahirkan tingkat kesejahteraan yang berpijak dari konsep negara-kesejahteraan (*welfare states*) yang pernah dijanjikan.¹ Namun janji negara kesejahteraan ini di kemudian waktu tidak lebih sebagai rekayasa kaum kapitalis untuk melakukan eksploitasi dan hegemoni lunak (*soft hegemony*) terhadap masyarakat khususnya di dunia ketiga. Eksploitasi dan hegemoni

¹Secara normatif, konsep tentang negara kesejahteraan berpijak pada beberapa prinsip: pendalaman demokratisasi, pemenuhan hak-hak sosial secara universal dan penguatan kohesi sosial di mana setiap individu punya peluang yang sama. Namun sebagaimana ditegaskan Titmuss bahwa terdapat banyak varian negara kesejahteraan sehingga satu varian yang pernah diterapkan di suatu negara belum tentu sesuai diterapkan di negara lain. Di antara varian tersebut adalah disebut dengan negara kesejahteraan residual (*residual welfare state*). Dalam varian ini, tanggung jawab kesejahteraan berada di tangan negara jika pasar mengalami kegagalan dalam memberikan jaminan kesejahteraan tersebut. Lebih jauh, lihat, Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo, "Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia", dalam Jurnal *Politika*, No. 3. Vol. 2. Tahun 2006, 7-41.

lunak ini merupakan pendekatan baru yang berbeda dengan sebelumnya yang bersifat keras (*hard hegemony*).²

Praktek eksploitasi dan hegemoni lunak di atas dijalankan melalui pembangunan supra-struktur dan infra-struktur yang dapat menjangkau nalar dan kesadaran masyarakat dunia ketiga. Globalisasi merupakan bagian dari keduanya yang dewasa ini telah mencapai puncaknya. Globalisasi tidak sekedar berupa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat infra-struktural berupa penemuan perangkat teknikal yang menjangkau ke seluruh kawasan dunia tanpa batas, namun lebih jauh memuat agenda kapitalisme dan neoliberalisme kontemporer.³ Di antara agenda tersebut adalah memaksimalkan infra-struktur globalisasi di atas sebagai sarana dan wahana ekspresi kebebasan bertindak dan berbicara demi pencapaian tujuan-tujuan demokratis liberal di bidang politik dan ekonomi. Demokrasi liberal (*liberal democracy*) produk kapitalisme kontemporer mengajarkan tentang prinsip kebebasan dan kemerdekaan baik secara politik dan ekonomi yang hampir tanpa batas.⁴ Meski demikian, prinsip tersebut tidak lebih sebagai jebakan (*democratic traps*) yang sengaja dipaksa demi membuka ruang dan celah bagi kepentingan kaum kapitalis.

Di Indonesia, fenomena praktek demokrasi liberal muncul sejak runtuhnya orde baru yang dibuktikan dengan jaminan hukum kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap warga negara Indonesia untuk terlibat aktif maupun pasif dalam proses politik dan ekonomi. Proyeksi keseimbangan hubungan antara rakyat dan negara dalam setiap kebijakan publik telah berjalan sedemikian rupa. Padahal ditinjau secara kritis, berbagai agenda yang diusung oleh kaum kapitalis berupa proyek-proyek demokratis baik dijalankan oleh pemerintah di satu sisi maupun organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) merupakan strategi efektif lahirnya intervensi dan integrasi kaum kapitalis di setiap produk kebijakan publik.⁵

²Hegemoni merupakan konsep dan praktek yang berkaitan dengan kekuasaan yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu atau orang lain sehingga disebut sebagai kekuasaan lunak (*soft power*) dan kekuasaan keras (*hard power*). Hegemoni lunak (*soft hegemony*) merupakan bentuk kekuasaan lunak di mana dalam perspektif ideologis beroperasi di wilayah nalar dan kesadaran terutama melalui pendekatan persuasif di samping rasional. Dalam struktur kapitalisme kontemporer, terdapat berbagai perangkat yang dapat mendukung agenda hegemoni maupun kekuasaan lunak di atas. Louis Althusser menyebut beberapa perangkat dengan istilah ISA (*ideological state apparatus*) berupa aktor atau agen dengan memaksimalkan kapasitas dan otoritasnya masing-masing. Bentuk hegemoni lunak atau kekuasaan lunak dewasa ini dapat berupa media massa yang memuat beragam rubrik maupun kebijakan-kebijakan lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi masyarakat. Untuk konsep hegemoni dan kekuasaan di atas, lihat, Joseph S. Nye, "Soft Power", dalam *Foreign Policy*, No. 80., 1990., 154., Joseph S. Nye, *Soft Power and Higher Educations* (Cambridge and Mass: Harvard University Press, 2008), 11., Luke Ferretter, *Routledge Critical Thinkers: Louis Althusser* (New York: Routledge, 2006), Asli Daldal, "Power and Ideology in Michael Foucault and Antonio Gramsci: A Comparative Analysis", dalam *Review of History and Political Science*, No. 2. Vol. 2, 2014, 149-167.

³W. Raharjo Jati, "Memahami Globalisasi Sebagai Evolusi Kapitalisme", dalam *Jurnal Global & Strategis*, No. 2. Vol. 7, 2013, 241-258.

⁴Meski kebebasan dan kemerdekaan tersebut tampak normatif sebagaimana ditegaskan Mill ketika menggagas tentang liberalisme klasik, namun di era modern justru memperlihatkan ketimpangan. Dengan kata lain, kebebasan dan kemerdekaan tersebut ditentukan sejauh mana kuasa dan kuantitas modal. Lihat, C.B. Macpherson, *The Life and Times Liberal Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 1979), 1.

⁵Fenomena ini menjadi keprihatinan Hadiwinata dalam diskursus tentang organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*) baik LSM maupun organisasi lain. Orientasi gerakan demokratis berupa transparansi dan partisipasi masyarakat yang berhadapan dengan kekuatan negara justru memberikan ruang bagi kekuatan neoliberalisme untuk terlibat dalam proses tersebut. Di sisi lain, pergeseran idealisme ke pragmatisme sebagian organisasi non pemerintah di atas merupakan fenomena dan realitas yang tidak

Problem kapitalisme dan liberalisme kontemporer di bidang politik dan ekonomi di atas merupakan pijakan bagi lahirnya mata rantai di bidang-bidang lain yang menjadi obyek kapitalisme dan liberalisme kontemporer. Hal ini didasarkan bahwa politik dan ekonomi merupakan aspek utama yang akan mempengaruhi aspek-aspek lain. Dengan kata lain, setiap bentuk kebijakan misalnya pendidikan, kebudayaan, sosial dan bahkan keagamaan akan dipengaruhi oleh produk kebijakan politik dan ekonomi. Lebih jauh, politik dan ekonomi merupakan episentrum yang mempengaruhi dan menentukan proses dan orientasi kebijakan-kebijakan lain. Dengan perwujudan orientasi kebebasan dan kemerdekaan yang diproduksi globalisasi di bidang politik dan ekonomi meski sejauh ini belum memperlihatkan keberhasilan maksimal tentang janji negara kesejahteraan di atas namun kaum kapitalis telah berhasil mengindoktrinasi tentang makna kebebasan dan kemerdekaan di atas. Indoktrinasi ini melahirkan seperangkat pikiran yang meski tidak diartikulasikan di dalam politik dan ekonomi formal namun menjadi semangat baru masyarakat dunia ketiga untuk memosisikannya sebagai landasan pemikiran dan perilaku kehidupan sehari-hari di wilayah sosial, kultural dan keagamaan.

Di wilayah kultural, doktrin kebebasan dan kemerdekaan ini memproduksi individu, komunitas dan masyarakat bercorak liberalistik yang mengagungkan kebebasan dan kemerdekaan baik pemikiran maupun tindakan. Dengan mengagungkan hak asasi manusia (HAM) maka setiap individu tersebut mengekspresikan kebebasan dan kemerdekaan yang hampir tanpa batas. Lebih jauh, dampak dari ekspresi yang ditimbulkan berupa hak individu lain untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan yang sama justru dirampas sedemikian rupa. Manifestasi doktrin kebebasan dan kemerdekaan di atas mendasari praktek kehidupan masyarakat yang tidak berbeda dengan prinsip kapitalisme dan liberalisme kontemporer. Praktek gaya hidup konsumeris dan hedonis merupakan manifestasi yang sengaja diproduksi dan direproduksi oleh kapitalisme dan liberalisme. Konsumerisme dan hedonisme merupakan bentuk gaya hidup yang berpijak dari kuantitas modal (*capital quantity*) dalam struktur pasar yang diproduksi oleh kaum kapitalis. Praktek gaya hidup hedonis dan konsumeris di atas di samping berorientasi komoditas fisik juga komoditas kultural yang dengannya melahirkan struktur nalar dan kesadaran ideologis utopis.

Konstruksi nalar dan kesadaran ideologis kapitalis yang mewujud dalam praktek hidup konsumeris dan hedonis di atas baik secara eksplisit maupun implisit berpijak dan berorientasi pada pasar. Dengan kata lain, kaum kapitalis dengan perangkat hegemoni lunak di atas sengaja mengonstruksi prinsip kebebasan dan kemerdekaan publik bagi pencapaian tujuan politik-ekonomi pasar. Di wilayah politik, mekanisme pasar ini telah mendasari dan mempengaruhi praktek demokrasi berupa agenda pemilu secara umum hingga kebijakan publik. Di wilayah budaya, mekanisme pasar ini dibuktikan dengan praktek gaya hidup konsumeris dan hedonis berorientasi komoditas baik fisik maupun kultural. Di bidang pendidikan, praktek liberalisme dan kapitalisme memosisikan sektor ini juga menjadi bagian dari arena pasar dengan mekanisme sebagaimana terdapat dalam pasar budaya.

bisa dipungkiri. Lihat, Bob Sugeng Hadiwinata "Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 1. Vol. 9. Tahun 2005, 1-7. Bob Sugeng Hadiwinata, *Politics of NGO in Indonesia* (Routledge: Curzon Research on Southeast Asia;3, 2003), 90-93.

Dalam kapitalisme dan liberalisme, prinsip kebebasan dan kemerdekaan berorientasi lahirnya manusia terdidik (*the educated man*) yang sejalan dengan prinsip-prinsip kapitalis berupa keberhasilan material dan bukan eksistensial. Penetrasi kebijakan kapitalisme dan liberalisme di sektor ini tampak dari praktek pendidikan yang mengembangkan dimensi kognitif, afektif dan psiko-motorik berorientasi akumulasi modal melalui berbagai pelatihan sebagai wahana pengembangan rasionalitas instrumental. Dalam kapitalisme pendidikan, peserta didik baik siswa maupun mahasiswa sengaja dikonstruksi menjadi manusia-manusia robot yang dipandang dapat memperkuat tujuan dan orientasi kaum kapitalis, yakni akumulasi modal.

Doktrin kapitalisme dan liberalisme pendidikan berorientasi pasar dan akumulasi kapital dewasa ini menjadi kecenderungan kontemporer sejalan dengan praktek pasar politik-ekonomi dan budaya di atas. Kecenderungan ini tampak dari sistem pendidikan yang berpijak dari ideologi pendidikan kapitalistik di mana memperoleh legitimasi sosial dan politik demikian kuat. Struktur kapitalisme di sektor sosial dan budaya di samping politik dan ekonomi dengan sendirinya memperlihatkan sebagai sangkar besi yang mempengaruhi struktur nalar dan kesadaran publik menyangkut sistem pendidikan yang harus diterapkan sehingga menghasilkan peserta didik yang terampil dan profesional dalam pasar kerja. Secara realis, orientasi pendidikan tersebut mengandung keabsahan di tengah arus pendidikan sebagai unsur utama penunjang kehidupan hari depan. Namun orientasi pendidikan tersebut justru memperlihatkan reduksionisme di mana nalar dan kesadaran peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, dijauhkan dari nilai-nilai spiritual dan transendental menuju rasionalitas-instrumental.

Di Indonesia, fenomena kapitalisme dan liberalisme pendidikan yang berpijak rasionalitas instrumental di atas merambah ke institusi pendidikan baik pendidikan umum maupun keagamaan. Meski telah diterapkan pendekatan integratif di mana institusi pendidikan keagamaan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan demikian sebaliknya, namun virus pendidikan kapitalistik dan liberalistik ini justru berpengaruh kuat. Penetrasi virus kapitalisme dan liberalisme di atas tentu disebabkan oleh faktor politik kebijakan, khususnya di bidang pendidikan di satu sisi dan faktor kultural dan keagamaan di sisi lain. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa faktor keagamaan dewasa ini juga memperlihatkan fenomena serupa yang tampak dari dinamika internal dan eksternal kehidupan keagamaan dalam ruang publik. Penetrasi virus kapitalisme yang diakibatkan beberapa faktor di atas menuntut apa yang disebut reorientasi paradigma pendidikan khususnya dalam institusi pendidikan Islam.

Reorientasi paradigma pendidikan Islam merupakan ikhtiar intelektual yang mendasari agenda berupa meninjau ulang secara kritis atas berbagai bentuk penetrasi virus kapitalisme dan liberalisme pendidikan di wilayah filsafat pendidikan Islam sebagai unsur fundamental dalam struktur paradigma di atas. Kajian ini akan memfokuskan pada bagaimana perspektif filsafat perennial sebagai suatu aliran dalam filsafat pendidikan Islam mendasari agenda reorientasi khususnya di wilayah pemikiran terhadap proyeksi pendidikan Islam. Kehadiran perspektif filsafat perennial dalam kajian ini berpijak dari asumsi bahwa kemajuan kapitalisme dan liberalisme kontemporer dengan konstruksi dan produksi budaya konsumerisme dan hedonisme di berbagai sektor kehidupan modern melahirkan krisis eksistensial (*existencial crisis*). Krisis eksistensial tersebut akibat dominasi rasionalitas instrumental yang mendegradasikan nalar dan kesadaran metafisik dan transendental yang menjadi tujuan fundamental pendidikan Islam. Krisis eksistensial tersebut diwujudkan berupa

dehumanisasi kesadaran eksistensial manusia menjadi kesadaran material di mana pendidikan menjadi sarana produksi pencapaian kuantitas kapital sebagaimana dalam doktrin kapitalisme dan liberalisme.

Dari asumsi di atas maka penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dengan sendirinya merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah filosofis-ideologis karena dinilai punya relevansi dengan tema di atas. Pendekatan filosofis berpijak dari aliran perennialisme yang didalamnya memuat teori dan konsep khususnya mengenai pendidikan Islam. Di samping itu, teori dan konsep pendidikan dalam perspektif filsafat perennial memuat dimensi reflektif kritis menyangkut fenomena dan realitas pendidikan kontemporer yang dikonstruksi oleh kapitalisme dan liberalisme kontemporer. Kapitalisme dan liberalisme merupakan konstruksi ideologi kontemporer yang berpijak dari filsafat liberalisme klasik yang memuat doktrin tentang kebebasan dan kemerdekaan. Dalam liberalisme klasik, dimensi kebebasan dan kemerdekaan mencakup berbagai aspek dalam diri manusia baik personal maupun sosial dan komunal.

Di era pencerahan, doktrin tersebut melepaskan ketergantungan masyarakat dari dogma atau doktrin gereja yang dinilai membelenggu nalar dan kesadaran manusia. Kelahiran kapitalisme yang berpijak dari doktrin liberalisme di atas mengalami pergeseran di mana kebebasan berusaha (*free enterprise*) setiap individu yang semula berbasis kapasitas sumber daya manual diganti dengan kuantitas modal. Dengan memposisikan kuantitas modal sebagai ukuran segalanya (*capital is the measure of all things*) maka melahirkan sistem kelas, yakni borjuis dan proletariat. Kelas pertama berupa individu-individu yang dengan kekuatan modalnya melahirkan sumber dan sarana produksi yang mencapai puncaknya di masa revolusi industri. Adapun kelas proletariat menduduki posisi sebagai sarana produksi yang bekerja bagi kaum borjuis. Kemunculan dua kelas di atas tidak sekedar sebagai proses sosial yang berjalan secara evolusioner dan revolusioner. Menurut Marx, kelahiran kelas di atas inheren dalam sejarah manusia, yakni sejarah perjuangan kelas.⁶

Di era modern, perjuangan kelas yang berpijak dari kuantitas modal merupakan bentuk tahapan menuju borjuasi sosial. Pendidikan merupakan aspek sekaligus unsur fundamental dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas personal di tengah arus industrialisasi pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja. Kehadiran kelas buruh terdidik dalam industri barang dan jasa hanya bisa dilakukan melalui sistem dan proses pendidikan yang berorientasi profesi sehingga melahirkan kaum profesional. Dari penegasan di atas tampak bahwa terjadi pergeseran tentang makna liberalisme yang semula menekankan dimensi kebebasan dan kemerdekaan humanistik namun kemudian berubah menjadi dimensi kebebasan dan kemerdekaan mekanistik dan instrumentalistik. Respon keras atas fenomena kapitalisme dan liberalisme pendidikan tersebut muncul dari berbagai kalangan.

Paradigma pendidikan kritis yang ditawarkan oleh beberapa pemikir, khususnya Freire, memperlihatkan kritik pedas atas struktur ideologis kapitalisme yang menjadikan institusi dan peserta pendidikan sebagai sarana produksi yang pada gilirannya menjadi

⁶Hal ini tampak dari pernyataan Marx bahwa, “*The history of all hitherto existing societies is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on interrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended in a revolutionary reconstruction of society at large, or in the common ruin of the contending Classes*”. Lihat, Karl Marx, *The Communist Manifesto of Karl Marx and Friedrich Engels* (New York: Pathfinder Press, 1970), 241.

tumbang kapitalisme itu sendiri. Meski demikian, kritik Freire tersebut tidak bisa dilepaskan dari paradigma filsafat yang mendasari, khususnya filsafat kritis dalam payung mazhab Frankfurt Jerman. Pembahasan mengenai tradisi filsafat kritis mazhab Frankfurt didasarkan bahwa aliran ini memberikan ragam perspektif dalam memahami tentang krisis manusia modern baik dalam konteks politik-ekonomi maupun sosial dan kultural serta pendidikan. Adapun pendidikan Islam berikut perspektif filsafat perennial di dalamnya merupakan pembahasan yang memosisikannya sebagai resolusi alternatif di wilayah paradigmatis. Sementara penerjemahan paradigma filsafat perennial ke dalam proyeksi pendidikan Islam baik secara teoritis maupun praksis menjadi pembahasan terakhir.

Krisis Modernitas Dalam Diskursus Kontemporer

Krisis modernitas (*crisis of modernity*) merupakan fenomena dan realitas yang meruanglingkupi berbagai sektor kehidupan yang diakibatkan struktur modernitas itu sendiri. Modernitas merupakan istilah sekaligus konsepsi yang berpijak dari kata modern akar kata *modernisme*, *modernisasi*, *modernis* dan *modernitas* itu sendiri. Derivasi kata modern tersebut mengandung pengertian berbeda-beda namun punya kesamaan substansi dan esensi. Secara historis, kata modern di atas identik dengan kemajuan baik berupa ide atau gagasan dan pemikiran maupun merujuk ke dalam perangkat dan alat teknologis sebagai simbolitas kemajuan tersebut. Hal ini didasarkan bahwa produksi teknologi merupakan pencapaian akhir dari manifestasi pengetahuan yang bersifat rasional dan empiris serta positif. Hal ini dengan sendirinya mempertegas bahwa dari sekian bentuk ilmu pengetahuan, hanya ilmu-ilmu yang berkategori *hard sciences* yakni fisika, matematika dan lainnya yang paling berkontribusi melahirkan perangkat teknologis sebagai simbolisasi modernitas.⁷

Padahal ditinjau secara kritis, pandangan di atas bersifat reduktif mengingat istilah modern sendiri merupakan produk dari era pencerahan yang di dalamnya seluruh ilmu pengetahuan lahir berbagai aliran filsafat. Dengan kata lain, dalam era pencerahan tersebut seluruh aliran filsafat yang meski memperlihatkan kontradiksi pemikiran namun punya kontribusi sama dalam melahirkan era tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran beberapa filosof kontemporer berhaluan kritis baik mazhab Frankfurt maupun Pos strukturalisme Perancis di mana krisis modernitas justru menuntut tinjauan ulang atas cita-cita pencerahan yang dijustifikasi oleh sebagian aliran dengan mengubur aliran lain. Padahal apa yang disebut aliran lain, khususnya idealisme dan eksistensialisme, memberikan jalur yang lebih bermakna bagi perjalanan modernitas itu sendiri.⁸ Tuntutan tinjauan ulang atas cita-cita pencerahan ini secara impresif dan implisit mendasari lahirnya revolusi ilmiah yang digagas Thomas Kuhn.⁹

⁷Dalam tradisi kritis Jerman khususnya mazhab Frankfurt, pencapaian kemajuan teknologi di atas tidak berbanding lurus dengan kemajuan eksistensial manusia modern. Sebaliknya, justru melahirkan dan menjadi akar lahirnya krisis manusia modern. Apa yang disebut Marcuse sebagai manusia satu dimensi dengan rasionalitas teknologis berikut karakteristik lainnya menimbulkan dehumanisasi. Sejalan dengan Marcuse, kritik atas modernitas juga dilakukan oleh Fromm dan hampir seluruh filosof mazhab Frankfurt di atas. Lihat, Herbert Marcuse, *Manusia Satu Dimensi*. terj. SG. Sukur dan Yusup P. (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2000), xvi-xvii.,

⁸Problem eksistensialisme manusia ini merupakan faktor yang mendasari lahirnya gugatan atas modernitas yang kemudian dikenal dengan Posmodernisme bercorak skeptis, yakni krisis kepercayaan atas modernitas. Di antara gugatan terhadap modernitas tersebut dilakukan oleh Horkheimer dan Adorno melalui proyek dialektika pencerahan (*dialectics of enlightenment*). Kelahiran Posmodernisme bercorak skeptis atas modernisme kemudian memberikan ruang baru bagi pencarian makna eksistensialisme

Meski terdapat berbagai suara protes di wilayah ontologis dan epistemologis terhadap aliran-aliran filsafat yang mendominasi rasionalitas pencerahan namun memperlihatkan bahwa revolusi ilmiah Kuhn sebenarnya mengarah pluralitas paradigmatis. Sejauh ini, dominasi positivisme logis dalam wilayah filsafat pengetahuan dipandang paling dominan yang bahkan mengintervensi ilmu pengetahuan di luar domain positivisme logis. Keharusan dan tuntutan pluralisme paradigmatis di atas sejauh ini menimbulkan perubahan revolusioner khususnya di bidang ilmu sosial dan humaniora, termasuk keagamaan (*religious studies*) menggunakan paradigma interpretatif dan hermeneutik. Realitas ini tampak dari pembagian paradigma Ritzer sebagai langkah responsif atas tuntutan dan keharusan revolusi ilmiah berupa paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial.¹⁰ Semangat pluralisme paradigmatis di atas memperlihatkan relevansi dengan kehadiran Posmodernisme yang bercorak skeptis terhadap modernitas akibat dampak yang ditimbulkan di atas.¹¹ Posmodernisme sejak awal mengusung misi berupa agenda dekonstruksi, yakni pembongkaran baik di wilayah paradigmatis maupun praksis, terhadap aliran-aliran filsafat yang mendominasi paradigma modernitas serta menjustifikasi sebagai satu satunya pewaris pencerahan Barat.¹²

Problem filosofis di balik struktur modernitas yang kemudian digugat sekaligus dibongkar sedemikian rupa oleh sebagian filosof merupakan konsekuensi logis dari krisis yang ditimbulkan oleh modernitas. Hal ini didasarkan bahwa krisis modernitas merupakan konsekuensi filosofis sekaligus praksis sehingga sikap radikalistik kaum filosof Posmodernis sengaja diambil untuk melihat kontradiksi berikut krisis yang ditimbulkan. Di samping wilayah filosofis, krisis modernitas mencapai puncaknya di tengah kemajuan teknologi yang diproduksi modernitas. Meski teknologi di masa awal

terutama melalui perspektif perennialisme di mana spiritualitas keagamaan menjadi unsur utama. Lihat, Theodore Adorno dan Max Horkheimer, *Dialektika Pencerahan: Mencari Identitas Manusia Rasional* (Yogyakarta: Ircisod, 2014)., Komaruddin Hidayat dan M. Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

⁹Kuhn memberikan alur lahirnya revolusi ilmiah yang dimulai dari Paradigma I, Normal science, Anomali, Krisis, Revolusi dan berakhir dengan Paradigma II. Lihat, Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* terj. T. Sujarman. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

¹⁰George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Peny. Alimandan. (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), khususnya bab II sampai bab V.

¹¹Meski terdapat pandangan skeptis atas modernitas namun tidak kurang yang berpandangan optimis bahwa Posmodernisme merupakan kelanjutan dari proyek modernisme yang belum selesai. Lihat, Jurgen Habermas, "Modernity: An Unfinished Project", dalam Mauricio d' Entreves dan Seyla Benhabib, ed, *Habermas and the Unfinished Project of Modernity* (Cambridge and Mass: The MIT Press, 1997), 38-55.

¹²Menurut Stocker, dekonstruksi sebenarnya bukan merupakan teori namun sebagai gerakan baik dalam filsafat maupun dalam kesadaran yang mencoba digambarkan oleh fenomenologi. Dengan kata lain, dekonstruksi merupakan suatu proses dan gerakan yang menjadi kekuatan material pemikiran ketimbang sebagai pendekatan filosofis. Adapun yang dimaksud dengan proses tersebut mencakup tentang perbedaan antara kehadiran nyata dengan representasi di mana keduanya tampak sama dalam kesadaran meski mengandung perbedaan. Proses dan gerakan dekonstruksi ini kemudian memposisikan-nya sebagai suatu teori yang hidup (*live-theory*). Adapun Royle menjabarkan bahwa dekonstruksi, sebagaimana dijabarkan sendiri oleh Derrida, adalah tentang apa yang terjadi (*what-happens*). Lebih jauh, muncul-nya definisi atau konsepsi tentang dekonstruksi yang beragam itu justru mempertegas dekonstruksi seperti gempa bumi. Sebab Derrida sendiri kadang menyebut-nya sebagai disorganisasi di samping sebagai desedimentasi. Lihat, Barry Stocker, *Derrida on Deconstruction* (New York: Routledge, 2006) 177-178., James K.A. Smith, *Jacques Derrida: Live Theory* (New York: Continuum, 2005)., Nicholas Royle, *Jacques Derrida* (London: Routledge, 2003), 25.

Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017

pencerahan merupakan sektor strategis dan fungsional bagi kemajuan peradaban manusia namun dewasa ini menimbulkan kekhawatiran sedemikian rupa. Realitas ini tampak bahwa tidak terdapat sektor kehidupan manusia mulai paling besar hingga paling kecil yang tidak diintervensi teknologi. Lebih jauh, terjadi pergeseran dalam manajemen teknologi dari yang fungsional menjadi instrumental. Nalar instrumental merupakan bentuk rasionalitas pencerahan yang diproduksi oleh beberapa aliran filsafat, khususnya positivisme, rasionalisme dan empirisme yang kemudian digugat oleh kaum Posmodernis, namun justru memperlihatkan watak dominan di era kontemporer. Dalam rasionalitas instrumental, kemajuan teknologi tidak lagi berpijak dari nilai fundamental aksiologis dan etis bagi kemajuan peradaban manusia namun justru menjadi mesin destruktif bagi eksistensi dan hari depan kehidupan manusia.

Rasionalitas instrumental di samping mewujudkan dalam aspek penerapan teknologi berikut dampak eksploitasi alam dan sebagainya yang ditimbulkan juga meluas ke dalam dimensi kehidupan manusia lain. Hal ini didasarkan bahwa kelahiran pencerahan tidak sekedar disimbolisasikan dengan produk teknologi namun juga struktur pikiran yang berpijak dari paradigma filosofis yang mendasari. Demikian pula, modernitas tidak saja terjadi di wilayah penciptaan teknologi baik untuk kepentingan manusia yang bersifat konstruktif maupun destruktif namun juga di sektor-sektor lain. Rasionalitas instrumental dalam struktur modernitas dewasa ini mempengaruhi dan mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan bahkan keagamaan. Rasionalitas instrumental dalam struktur modernitas ini mencoba mengabaikan dimensi esoterisme berupa nalar teologis, metafisik dan spiritual sebagai unsur-unsur fundamental dan eksistensial individu maupun masyarakat.

Untuk memperkuat dominasi rasionalitas instrumental di atas maka diperlukan apa yang disebut ideologisasi di wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Habermas, ideologisasi merupakan tindakan justifikasi atau pembenaran sefihak dengan mengabaikan dan bahkan mengubur kebenaran lain demi pencapaian tujuan-tujuan yang diharapkan. Ideologisasi di ranah ilmu pengetahuan dan teknologi mengabaikan praktek diskursus rasional demi pencapaian kepentingan laten yang tersembunyi di balik doktrin ilmiah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa terdapat kepentingan di balik pengetahuan sehingga menuntut bagaimana doktrin ilmiah tersebut memuat argumentasi-argumentasi yang tidak terbantahkan.¹³ Dalam proses berikutnya, agenda ideologisasi mewujudkan berupa kapitalisme dan liberalisme yang mencapai puncaknya di abad ke-21 ini. Proses perjalanan kapitalisme dan liberalisme ini pada mulanya terjadi di wilayah politik dan ekonomi dengan memperkenalkan doktrin tentang demokrasi dan industrialisasi. Dua bentuk doktrin tersebut, di samping lainnya, memperlihatkan keberhasilan di Negara-negara Barat untuk kemudian ditransformasikan ke seluruh dunia ketiga.

Meski demikian, demokrasi dewasa ini tidak bisa direduksi hanya menyangkut aspek politik dan ekonomi berikut dinamika yang meruanglingkupi. Demokrasi juga mengalami perkembangan dan kemajuan pesat di abad ke-21 yang secara fundamental mulai meninggalkan prinsip dan nilai-nilai awal, yakni kedaulatan rakyat, menuju apa

¹³Problem yang ditimbulkan oleh dominasi kepentingan di balik rasionalitas teknologis ini direpson kritis oleh Habermas dengan menawarkan ontologi dan epistemologi bercorak praksis emansipatoris. Lebih jauh, lihat, Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interest* (Boston: Beacon Press, 1971), F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 7. Herbert Marcuse, *Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory* (London: Routledge and Kegan Paul, 1973), 9., Alan How, *Critical Theory* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 6.

yang disebut kedaulatan pasar. Ekspansi demokrasi menuju arena sosial dan kultural serta keagamaan merupakan fenomena dan realitas kontemporer dengan tetap memposisikan doktrin pasar sebagai landasannya. Kemajuan globalisasi yang difungsikan untuk memperkuat proses pengembangan dan kemajuan demokrasi di setiap sektor yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi memposisikan aspek budaya, sosial dan keagamaan sebagai bagian dari komoditas dalam pasar politik. Kemajuan kapitalisme dan liberalisme yang diperkuat dengan globalisasi semakin memperlihatkan dominasi rasionalitas teknologis di dalamnya.

Jika rasionalitas instrumental dalam sistem demokrasi politik dan ekonomi didominasi oleh orientasi-orientasi material sejalan dengan konstruksi ideologi kapitalisme dan liberalisme maka dominasi serupa terjadi di sektor-sektor lain. Rasionalitas instrumental tidak bisa hanya direduksi sebagai cara dan praktek berfikir yang berorientasi hasil dengan jalan melihat segala sesuatu sebagai alat namun sesungguhnya mencerminkan pergeseran dimensi filosofis yang mendasar. Hal ini tampak dari sejarah filsafat Barat yang sejak awal mengubur aspek teologis dan metafisik untuk digantikan dengan aspek materialisme yang tersembunyi di balik nalar positivistik.¹⁴ Nalar positivistik yang dalam perkembangannya melahirkan rasionalitas instrumental di atas sengaja mengonstruksi nalar dan kesadaran manusia berbasis materialisme sebagai episentrum eksistensialisme. Realitas tersebut dewasa ini mencapai puncaknya di mana kesadaran materialisme yang diperkuat dengan doktrin kapitalisme dan liberalisme telah menyebar ke berbagai sektor dengan menggeser kesadaran eksistensialisme yang bercorak metafisik dan spiritualisme.

Kemajuan kapitalisme dan liberalisme kontemporer ditandai dengan konstruksi ideologis tersebut yang di samping masih berorientasi pada akumulasi modal, sebagaimana ditegaskan Marx, juga berorientasi pada praktek gaya hidup sebagai manifestasi modal tersebut. Apa yang disebut gaya hidup hedonis berpusat kesenangan dan kenikmatan merupakan janji baru kapitalisme dan liberalisme yang diperkuat dengan agenda globalisasi politik dan ekonomi untuk mewujudkan apa yang disebut negara kesejahteraan (*welfare states*). Konsep negara kesejahteraan ini di samping bersifat struktural dalam ranah kebijakan publik yang berpusat pada logika pasar juga bersifat sosial dan kultural berupa ekspresi gaya hidup kapitalistik dan hedonistik di atas. Untuk memperkuat orientasi ideologis di atas maka diperlukan apa yang disebut strategi penyebaran yang oleh Thompson beroperasi di wilayah kognitif.¹⁵ Wilayah kognitif bagi penyebaran ideologis di pandang penting sesuai dengan pengertian ideologis berupa nalar dan kesadaran baik subyektif maupun obyektif.

Modus penyebaran ideologis kapitalisme dan liberalisme yang berpijak dari rasionalitas pencerahan yang bercorak instrumental tidak saja memuat pendekatan

¹⁴Meski Comte telah menggagas apa yang disebut agama humanitas (*religion of humanity*) namun belum memperlihatkan dimensi metafisik dan transendental sebagaimana agama-agama konvensional lainnya. Menurut Wernick, faktor lahirnya ide agama humanitas Comte di dasarkan atas krisis industrialisme masyarakat Barat. Dengan ide agama humanitas tersebut, Comte mencoba mengakomodasi agama sebagai domain terakhir dalam teori sosial-nya melalui nalar rasionalitas positif-nya. Meski demikian, agama humanitas tersebut tidak murni bercorak Kristiani namun justru menghilangkan tatanan buruk dalam Kristiani. Apa yang disebut sebagai filsafat yang sehat pada giliran-nya dapat menemukan agama humanitas sebagai agama yang benar (*true-religion*). Lebih jauh, lihat, Andrew Wernick, *Auguste Comte and the Religion of Humanity: The Post Theistic Program of French Social Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 81-115.

¹⁵John B. Thompson, *Studies in the Theory of Ideology* (California: The University of California Press, 1984).

namun juga arena-arena penyebaran sehingga orientasi penyebaran tersebut berhasil secara maksimal. Dari berbagai arena di atas, pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak bisa diabaikan mengingat ideologi merupakan unsur penting bagi konstruksi nalar dan kesadaran yang harus sejalan dengan prinsip kapitalisme dan liberalisme sekaligus menjadi episentrum kesadaran eksistensial dari wilayah pendidikan menuju arena yang lebih luas, khususnya sosial dan kultural. Di Indonesia, ideologisasi kapitalisme dan liberalisme ke dunia pendidikan bukan merupakan tema baru namun telah terjadi sejak era orde baru. Meski era orde baru membuat kebijakan pendidikan yang berorientasi fungsional bagi pengembangan teknologi, jika menggunakan terminologi Rostow,¹⁶ namun belum berdampak pada pergeseran kesadaran eksistensial masyarakat Indonesia. Hal ini juga dilatarbelakangi bahwa kehidupan demokrasi belum memperlihatkan praktek liberalisme politik yang berpusat pada pasar sehingga menuntut penyesuaian struktural bagi bidang-bidang pembangunan lain. Wajah pendidikan orde baru masih dikonstruksi sesuai dengan doktrin tertib politik bagi pemenuhan stabilitas nasional sebagai syarat bagi pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Di era pasca orde baru atau reformasi, terdapat gejala ideologisasi pendidikan di balik setiap produk kebijakan pendidikan yang sejalan dengan kapitalisme dan liberalisme kontemporer. Di era kontemporer, penyesuaian ideologi kapitalisme dan liberalisme tersebut juga dimulai dengan konstruksi filosofis yang mendasari pelaksanaan pendidikan. Konstruksi filosofis tersebut tampak dari sistem yang ditetapkan berikut manifestasinya di berbagai institusi pendidikan baik dasar maupun pendidikan tinggi. Dominasi materi pembelajaran yang berpusat dari *hard sciences* sengaja menjadi prioritas utama yang berpijak dari argumentasi untuk menunjang pembangunan nasional di bidang teknologi. Di samping itu, terdapat materi pembelajaran lain yang juga dinilai dapat memperkuat orientasi dalam visi pembangunan baik nasional dan lokal yang bersifat ekonomistik. Dominasi materi pembelajaran tertentu dalam berbagai dan jenjang di dalam institusi pendidikan tersebut namun mengabaikan materi pembelajaran lain merupakan indikasi sekaligus fenomena pergeseran eksistensial dari yang spiritual menuju yang material. Lebih jauh, dominasi materi pembelajaran tertentu dalam pusaran kapitalisme berpijak dari pandangan bahwa hanya materi-materi tertentu yang sejalan dengan permintaan pasar meski kemudian mengorbankan materi lain. Pandangan dikotomis terhadap ilmu pengetahuan di atas mempertegas betapa rasionalitas instrumental di dalam kapitalisme berpengaruh besar bagi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Modus penyebaran kapitalisme bagi pergeseran menuju kesadaran eksistensial berbasis material mencapai puncaknya di era globalisasi yang sejak awal dijadikan sebagai mesin kapitalisme (*capitalism machine*). Sebagai mesin kapitalisme, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini difungsikan untuk menciptakan dan membangun citra pendidikan kapitalistik yang diperkuat dengan janji berupa struktur narasi tentang kesejahteraan hari depan. Struktur narasi ini dikonstruksi sekaligus disebarkan melalui berbagai perangkat teknologi informasi sehingga dapat mempersuasi masyarakat pendidikan secara luas. Pola dominasi di balik penyebaran melalui mesin kapitalisme ini sejauh ini memperlihatkan hasil maksimal yang dibuktikan dengan

¹⁶W.W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 4-16.

¹⁷Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968), 11-35.

ketertarikan publik untuk masuk ke sektor pendidikan profesional berbasis rasionalitas instrumental.

Globalisasi sebagai mesin kapitalisme mampu mengonstruksi struktur narasi kapitalisme pendidikan yang di samping berupa harapan masa depan yang cerah juga menyebarkan ilusi-ilusi eksistensialisme material berupa gaya hidup kapitalistik dan hedonistik di atas. Fenomena ini tampak telah menimbulkan alienasi kesadaran eksistensial sebagian masyarakat, termasuk masyarakat pendidikan. Hal ini didasarkan bahwa penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet tidak saja memperlihatkan rasionalisasi namun juga alienasi. Jika rasionalisasi atas teknologi informasi merupakan sikap fungsional bagi sebagian masyarakat maka alienasi justru menjadikannya sebagai sublimasi eksistensial dari kondisi alienasi di atas.

Meski demikian, kemajuan globalisasi hanya sebagai satu dari sekian banyak mesin kapitalisme, khususnya kapitalisme pendidikan, yang beroperasi dan berpenetrasi di ruang publik. Upaya memaksimalkan orientasi terbentuknya rasionalitas instrumental yang berpijak dari nalar-nalar kapitalis berikut praktek gaya hidup hedonis telah merambah ke dalam ruang publik sosial yang lebih luas. Misi pergeseran dari kesadaran eksistensial berbasis metafisikal dan spiritual menuju kesadaran berbasis rasionalitas instrumental juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini secara eksplisit dan implisit merupakan tantangan bagi institusi pendidikan yang sejauh ini masih memperlihatkan komitmen dan konsistensi dalam mengajarkan kesadaran eksistensial berbasis metafisikal dan spiritual di atas.

Filsafat Perennial Dalam Pendidikan Islam

Pergeseran kesadaran eksistensial berbasis rasionalitas instrumental merupakan faktor utama lahirnya krisis manusia modern yang sengaja dikonstruksi oleh ideologi kapitalisme dan liberalisme khususnya di bidang pendidikan. Krisis modernitas berupa alienasi dan destruksi lain yang ditimbulkan berjalan sinergis sebagaimana terjadi pada masa awal pencerahan. Tragedi kemanusiaan yang diwariskan oleh pencerahan berupa krisis lingkungan, sosial, politik dan ekonomi yang mendasari sebagian filosof berhaluan Posmodernis melakukan tinjauan ulang, gugatan dan bahkan dekonstruksi filosofis. Demikian pula di bidang pendidikan di mana penetrasi dan penyebaran ideologis kapitalisme dengan beragam janji tentang kesejahteraan juga menimbulkan anomali. Sementara dampak berupa alienasi atau keterasingan manusia modern sudah menjadi fakta dan realitas berupa perilaku menyimpang, manipulasi dan korupsi kekuasaan, praktek hedonisme dan sebagainya. Dengan demikian, krisis manusia modern merupakan krisis eksistensial dari struktur modernitas yang berpijak dari rasionalitas instrumental kemudian mendasari ideologi kapitalisme dan liberalisme yang menyebar melalui perangkat globalisasi sehingga krisis tersebut semakin bersifat masif.

Meski bidang pendidikan menjadi obyek kapitalisme pendidikan dengan menawarkan orientasi ideologis tentang kesejahteraan berikut rasionalitas instrumental sebagai landasan filosofis namun masih memperlihatkan pertahanan kuat. Institusi pendidikan Islam mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi masih menjadi benteng kokoh di tengah krisis modernitas di atas. Hal ini didasarkan bahwa pendidikan Islam baik secara ideologis maupun filosofis berpijak dari landasan teologis Islam yang demikian kuat. Meski demikian, landasan tersebut juga tidak selalu menjamin pertahanan di tengah krisis modernitas tanpa upaya rekonstruksi paradigmatis. Sebab bagaimanapun, sebagian institusi pendidikan Islam dewasa ini justru masih melakukan

adaptasi atau penyesuaian struktural dalam payung kapitalisme pendidikan di Indonesia. Realitas di atas memperlihatkan bahwa terdapat pluralisme filosofis dan ideologis dalam merespon kemajuan modernitas yang didominasi ideologi kapitalisme dan liberalisme. Pluralisme filosofis dan ideologis merupakan keniscayaan empiris yang tidak bisa diabaikan.

Kehadiran filsafat perennial sebagai perspektif pendidikan Islam memperlihatkan relevansi dan urgensi di tengah krisis modernitas yang mencapai puncaknya akibat dominasi ideologis kapitalisme dan liberalisme. Filsafat perennial merupakan suatu aliran dapat difungsikan untuk meninjau ulang sekaligus mempertanyakan secara kritis tentang struktur modernitas berikut proyeksi yang hendak diwujudkan. Pergeseran ke arah kesadaran eksistensial berbasis material melalui dominasi rasionalitas instrumental berikut krisis yang ditimbulkan telah memenuhi syarat untuk melakukan beberapa langkah di atas. Secara historis, perspektif perennial dalam tradisi filsafat lahir di Barat namun dalam perkembangannya justru memperlihatkan pijakan dan landasan yang bersifat universal. Sejauh ini terdapat beberapa pengertian tentang perennialisme.

Dalam *Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English* ditegaskan bahwa istilah Perennialisme keabadian atau yang abadi.¹⁸ Dengan demikian, filsafat Perennialisme merupakan suatu aliran yang mengajarkan tentang nilai-nilai dan norma yang dianggap punya sifat abadi atau keabadian. Nilai dan norma abadi atau keabadian ini terdapat dalam doktrin dan ajaran agama. Dalam Islam, kata dan istilah abadi atau keabadian ini terdapat di berbagai ayat dalam kitab suci (al-Qur'an). Kata dan istilah abadi atau keabadian ini untuk mempertegas tentang suatu tindakan dan perbuatan manusia yang mengandung konsekuensi baik atau buruk sehingga menuntut manusia untuk mempertimbangkan suatu perbuatan tersebut. Di samping itu, kata dan istilah abadi atau keabadian yang terkandung dalam pengertian Perennialisme tersebut terdapat dimensi ruang dan waktu masa lampau dalam konsep Perennialisme. Dimensi ruang dan waktu lampau ini bukan berarti bahwa Perennialisme menitikberatkan pada romantisme sejarah. Sebab bagaimanapun, romantisme sejarah yang difahami secara ideologis dan politis justru tidak memperlihatkan nilai-nilai normatif dan etis. Sebaliknya, romantisme sejarah tidak lebih sebagai sublimasi berupa imajinasi-imajinasi yang dikonstruksi untuk membangun atau mempertahankan kekuasaan.

Kehadiran perspektif Perennialisme baik di wilayah filsafat umum maupun pendidikan Islam justru menjadi pilihan di tengah arus modernisme dan modernitas yang mendegradasikan berbagai sistem nilai yang telah terbangun sejak lama. Menurut Zuhairin, orientasi dasar filsafat Perennialisme di dalam pendidikan Islam di tengah tantangan modernitas di atas adalah membangun eksistensi kehidupan yang berpijak atas kebudayaan masa lampau. Hal ini didasarkan bahwa kebudayaan masa lampau yang disebut pula dengan tradisi telah dibangun oleh nenek moyang yang masih memperlihatkan idealitas jika dibandingkan dengan era modern.¹⁹ Filsafat Perennialisme mengandung beberapa prinsip dasar. *Pertama*, Perennialisme memberikan jalan bagi pencapaian tertinggi menuju kepada Yang Absolut (Tuhan) dengan menggunakan pendekatan mistik. *Kedua*, Perennialisme menjelaskan tentang adanya sumber dari segala sumber (*being from being*) bahwa segala sesuatu bersifat relatif dan

¹⁸AS. Hornby, *Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English* (New York: Oxford University Press, 1987), 1080.

¹⁹Zuhairin, ed, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 28.

kreatif sekaligus merupakan cermin dari ketuhanan di mana esensi dan substansi-Nya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dalam Islam, Perennialisme memandang bahwa Tuhan telah memberikan dan menanamkan iman dan Islam dalam diri setiap manusia. Alienasi atas iman dan Islam yang ditanamkan Tuhan diakibatkan oleh nafsu keserakahan dan kerakusan sehingga menimbun keimanan dan keislaman tersebut. Untuk kembali kepada jalan-Nya, maka manusia harus menemukan jalan-Nya berupa tradisi-tradisi, simbol dan sarana lainnya.²⁰

Dari sekilas konsepsi Perennialisme di atas tampak bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar yang demikian kritis terhadap modernitas. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, prinsip dasar Perennialisme di atas telah tertanam demikian kuat sejak lahirnya Islam di nusantara. Bahkan lebih jauh, prinsip dasar Perennialisme juga tampak dari nilai-nilai Hinduisme dan Budhisme sebagai tipikal dua agama yang hidup di nusantara pra-Islam. Hal ini didasarkan bahwa doktrin Perennialisme berupa nilai-nilai kebajikan bersifat universal karena terdapat titik temu dari berbagai tradisi keagamaan di samping kebudayaan. Nilai-nilai Perennial di Indonesia sebagai warisan Hindu dan Budha maupun Islam tersebut telah menjadi apa yang disebut sebagai kearifan lokal (*local genuine*). Di Indonesia, khususnya Jawa, nilai-nilai kearifan lokal tersebut masih menjadi kepercayaan sebagian orang tua yang kemudian diwariskan secara turun temurun melalui pendidikan informal dan non-formal. Keberadaan kearifan lokal sejauh ini turut menjadi unsur pertahanan di tengah arus modernitas berikut dampak yang ditimbulkan.

Meski demikian, upaya memposisikan nilai kearifan lokal sebagai unsur pertahanan dalam arus modernitas bukan merupakan langkah mudah. Sebagaimana ditegaskan di atas bahwa respon dan persepsi atas tradisi baik dari agama maupun kebudayaan memperlihatkan pluralisme sedemikian rupa. Di satu sisi, terdapat sebagian institusi pendidikan Islam khususnya di kalangan tradisionalis Islam yang masih konsisten mempertahankan nilai-nilai di atas. Namun di sisi lain terdapat sebagian institusi pendidikan Islam yang demikian adaptif, bahkan tanpa sikap kritis, terhadap janji-janji kapitalisme pendidikan dalam selubung modernitas. Dinamika filosofis dalam pendidikan Islam di atas merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan. Namun demikian, respon dan sikap pendidikan Islam atas kemajuan kapitalisme dan liberalisme sebagai anak kandung modernitas bukan sekedar menyangkut sistem semata. Lebih jauh, dinamika filosofis di atas justru menentukan orientasi filosofis tentang bagaimana mengonstruksi kesadaran eksistensial terhadap peserta pendidikan baik di tingkat dasar maupun pendidikan tinggi.

Dalam perspektif Perennial, struktur modernitas yang memuat beberapa landasan filosofis dan ideologis di atas berorientasi bagi terwujudnya apa yang disebut sebagai manusia material (*material man*). Manusia material ini tidak sekedar berupa struktur tubuh materi namun juga mengarah pada konstruksi nalar dan kesadaran yang berpusat pada materi. Dominasi materialisme yang sejak awal terdapat dalam landasan filosofis pada gilirannya mendasari kesadaran eksistensialisme yang berpusat pada materi. Krisis manusia modern merupakan produksi dan reproduksi materialisme sehingga mengubur dimensi metafisika-transendental yang bersifat teosentris. Kesadaran eksistensial berbasis materialisme dewasa ini tampak dari praktek kehidupan sebagian masyarakat berupa kepemilikan simbol-simbol kapitalisme sebagai landasan utama keberadaannya.

²⁰Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 24

Jika rasionalisme Descartes menegaskan eksistensi manusia dari tindakan berfikir (*cogito ergo sum*) maka manusia material menegaskan keberadaan diri dari kuantitas modal atau kekayaan berikut derivasinya.

Upaya rekonstruksi kebajikan perenial baik dari tradisi agama maupun kebudayaan di tengah pluralisme ideologis pendidikan menuntut suatu institusi pendidikan, baik dasar maupun tinggi, untuk kembali kepada tradisi. Rekonstruksi nilai-nilai tradisional di era kontemporer tidak bisa dinilai sebagai sikap konservatif dan fatalistik atas kemajuan modernitas namun justru menjadi alternatif di tengah eksploitasi dan hegemoni modernitas yang sengaja memaksakan kesadaran eksistensial manusia bercorak materialistik. Upaya rekonstruksi di atas menuntut kesadaran kolektif dalam struktur sosial menyangkut keberlangsungan tradisi yang selama ini berjalan sekaligus menuntut konsekuensi untuk tetap mempertahankannya. Kesadaran kolektif tersebut tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan diskursus atau wacana dalam ruang publik sosial dan budaya di masyarakat secara kognitif namun juga kritis. Lebih jauh, upaya rekonstruksi dengan beberapa pendekatan tersebut dimungkinkan menghasilkan struktur sosial dan kultural yang tidak mudah diintervensi oleh berbagai simbol modernitas yang merenggut kesadaran eksistensial berbasis kebajikan perenial.

Proyeksi Pendidikan Islam Dalam Krisis Modernitas

Fenomena kapitalisme pendidikan berikut dampak krisis modernitas yang ditimbulkan merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan. Dominasi struktur kapitalisme berupa nalar dan kesadaran kapitalis dan hedonis yang menyebar ke sektor pendidikan menuntut langkah dan proses dialektis-kritis dalam membangun konvergensi rasional. Kehadiran filsafat perenial sebagai suatu perspektif dalam pendidikan Islam harus menjadi paradigma dalam proses dialektis di atas. Secara historis, respon kritis atas kapitalisme dan liberalisme direpresentasikan oleh sosialisme dan komunisme di bidang politik dan ekonomi. Meski demikian, sosialisme dan komunisme yang berakar dari Marxisme juga menjadi aliran filsafat yang kemudian mendasari berbagai bidang pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Bahkan dalam pemikiran Islam (*Islamic thoughts*) lahir apa yang disebut teologi pembebasan yang berpijak dan berlandaskan teori-teori Marxisme.²¹

Namun demikian, adopsi filsafat Marxisme sebagai perangkat kritik atas kapitalisme dan liberalisme belum memberikan dampak signifikan. Hal ini didasarkan bahwa kelahiran Marxisme tidak lebih sebagai kritik atas kapitalisme dan liberalisme yang sejak awal berputar pada problem materialisme sebagai landasan eksistensial. Dengan demikian, Marxisme sendiri secara filosofis hanya memuat struktur filosofis yang bercorak materialisme. Kehadiran filsafat perenial dalam pusaran kapitalisme pendidikan dapat menjadi nalar kritis atas materialisme yang terkandung dalam kapitalisme dan liberalisme baik secara filosofis maupun ideologis. Dimensi kritis dalam filsafat perenialisme tampak dari prinsip dan nilai filosofis yang ditawarkan di atas. Meski demikian, fungsi kritis dalam perspektif perenial tersebut tidak bisa diaktualisasikan secara ekstrim dan radikal. Hal ini didasarkan bahwa sikap realisme ideologis dalam masyarakat Indonesia di tengah kemajuan kapitalisme dan liberalisme

²¹Hamid Dabashi, *Islamic Theology Liberation: Resisting the Empire* (London and New York: Routledge, 2008)., Asghar Ali Engineer, *Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)., Iswahyudi, "Nalar Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer," dalam Wasid,dkk, *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas: Ide-ide Pembaruan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2011), 339.

menjadi alternatif utama. Realisme ideologis tersebut secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai kehendak dan tindakan berorientasi material atau kapital demi pemenuhan kebutuhan.

Dialektika antara perenialisme dengan kapitalisme dan liberalisme kontemporer sebagai produk modernitas baik secara ekstrimis maupun realis bagi proyeksi pendidikan Islam menjadi bagian fenomena Posmodernisme yang sejak awal bersikap afirmatif sekaligus skeptis terhadap modernisme dan modernitas. Dalam perspektif pendidikan, dialektika tersebut merupakan langkah penting bagi proses penyusunan kurikulum lokal sebagai interpretasi terhadap kurikulum nasional. Upaya dialektika tersebut sebagai bentuk respon atas kemajuan modernitas yang kapitalistik dan liberalistik yang tentu tidak selalu sejalan dengan visi lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Dalam tradisi filsafat, kehadiran Posmodernisme bercorak partikularistik memberikan ruang dan celah bagi respon dan sikap kritis terhadap segala sesuatu yang terkandung dalam modernitas, khususnya krisis manusia modern, Dari corak partikularistik tersebut sesungguhnya perspektif perenialisme yang mendasari konstruksi atau struktur kurikulum lokal dapat menjadi produk unggulan yang kemudian dimanifestasikan ke dalam proses pembelajaran.

Meski demikian, dialektika filosofis dengan memposisikan perspektif perenialisme sebagai paradigma kritis berhadapan dengan modernitas yang kapitalistik dan liberalistik menuntut keberlangsungan dialektis di ranah sosiologis dan budaya. Hal ini didasarkan bahwa meski perspektif perenialisme merupakan solusi alternatif dalam mengatasi krisis modernitas namun dihadapkan pada struktur kapitalisme dan liberalisme yang demikian mengekang. Kekangan struktural sehingga melahirkan nalar dan kesadaran kapitalistik dan liberalistik sebagai unsur dominan eksistensi manusia modern merupakan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Struktur kapitalisme dan liberalisme berikut rasionalitas instrumental yang terkandung di dalamnya kerap kali memperlihatkan sebagai kekangan lunak (*soft constraining*) sehingga menuntut langkah dekonstruktif dan rekonstruktif. Fenomena tersebut tidak saja terjadi dalam masyarakat luas namun juga menjangkiti sebagian besar peserta pendidikan sebagai produk struktural tersebut.

Dari penegasan di atas maka dialektika filosofis ke sosiologis merupakan keniscayaan sekaligus keharusan dengan memprioritaskan dekonstruksi dan rekonstruksi atas rasionalitas instrumental yang sejauh ini telah menjadi bagian tradisi dan budaya baru masyarakat kontemporer. Upaya dialektis tersebut dengan sendirinya menuntut dan mengharuskan aktor atau subyek baik personal maupun kolektif di dalam struktur kapitalisme di atas. Fungsi dan peran aktor atau subyek tersebut di samping merupakan agen pendidikan populer dengan mengusung kesadaran perenial juga terlibat secara kritis di dalam struktur kapitalisme dan liberalisme di atas. Hubungan antara agen dengan struktur di era kontemporer harus berjalan seimbang sebagai bentuk kesadaran etis dan moral di tengah paradigma realisme terhadap modernitas berikut derivasi ideologisnya. Kesadaran perenial yang berpijak dari nilai-nilai tradisional berupa kearifan lokal di satu sisi dan penetrasi modernitas di sisi lain dimungkinkan melahirkan konvergensi dengan tetap menjunjung tinggi kesadaran transendental.

Dialektika filosofis dan sosiologis antara perspektif perenial dengan modernitas berwatak instrumental, kapitalis dan liberalis yang diwujudkan secara praksis dalam struktur sosial dan kultural dengan sendirinya menuntut sinergitas di tingkat institusi pendidikan. Hal ini didasarkan bahwa hubungan antara institusi pendidikan dengan struktur sosial dan kultural tersebut berjaln berkelindan di mana aspek kesadaran

eksistensial antara yang material dengan yang transendental juga terjadi di dalamnya. Dalam proses pembelajaran, konstruksi tradisi dan nilai-nilai lokal sebagai basis perenialisme harus diposisikan sebagai kendali eksistensial setiap individu, khususnya peserta didik. Sejauh ini, fenomena penghambaan atas modernitas yang disebut pula dengan *westoxization* berikut derivasinya masih tampak dominan dalam dunia pendidikan. Sikap realisme dan juga moderatisme baik terhadap perenialisme maupun modernisme merupakan kebijakan alternatif sehingga tidak terjebak ke dalam salah satu kutub ekstrimisme dan fundamentalisme filosofis dan ideologis pendidikan.

Kesimpulan

Perenialisme merupakan aliran filsafat khususnya filsafat pendidikan Islam yang berpijak dari nilai-nilai tradisional baik dari agama maupun kebudayaan yang bersifat teosentris. Dimensi teosentrisme dalam tradisi perenial ini menjadi solusi alternatif bagi rekonstruksi nalar dan kesadaran eksistensial manusia modern. Hal ini didasarkan bahwa modernisme sebagai produk pencerahan Barat memuat doktrin dan ajaran filosofis yang berpusat pada materialisme. Dimensi materialisme ini kemudian mendasari konstruksi ideologis kapitalisme dan liberalisme yang mengusung semangat materialisme yang harus melandasi nalar dan kesadaran eksistensial maupun dimanifestasikan berupa praktek gaya hidup kapitalistik, borjuis dan hedonistik. Dalam perspektif pendidikan, rekonstruksi kesadaran perenial ini merupakan agenda utama di tengah penetrasi kapitalisme pendidikan yang menjauhkan kesadaran transendental menuju kesadaran material. Rekonstruksi kesadaran perenial ini dimulai dari proses dialektis filosofis di satu sisi dan sosiologis di sisi lain. Rekonstruksi melalui proses dialektis tersebut dapat dijadikan sebagai landasan filosofis dalam penyusunan kurikulum pendidikan berbasis perenialisme. Kurikulum perenialistik ini dengan sendirinya mendasari setiap proses pembelajaran baik secara paradigmatis maupun praksis.

Daftar Pustaka

- Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo, (2006), *Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia*, dalam *Jurnal Politika*, No. 3. Vol. 2. Tahun 2006, 7-41.
- Joseph S. Nye, (1990), “*Soft Power*”, dalam *Foreign Policy*, No. 80.
- Joseph S. Nye, *Soft Power and Higher Educations* (Cambridge and Mass: Harvard University Press, 2008).
- Luke Ferretter, (2006), *Routledge Critical Thinkers: Louis Althusser*, New York: Routledge.
- Asli Daldal, (2004), “*Power and Ideology in Michael Foucault and Antonio Gramsci: A Comparative Analysis*”, dalam *Review of History and Political Science*, No. 2. Vol. 2, 2014.
- W. Raharjo Jati, (2013), “*Memahami Globalisasi Sebagai Evolusi Kapitalisme*”, dalam *Jurnal Global & Strategis*, No. 2. Vol. 7, 2013.
- C.B. Macpherson, (1979), *The Life and Times Liberal Democracy*, Oxford: Oxford University Press.

- Bob Sugeng Hadiwinata, (2005), “*Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi*” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 1. Vol. 9. Tahun 2005.
- Bob Sugeng Hadiwinata, (2003), *Politics of NGO in Indonesia*, Routledge: Curzon Research on Southeast Asia;3
- Karl Marx, (1970), *The Communist Manifesto of Karl Marx and Friedrich Engels*. New York: Pathfinder Press.
- Herbert Marcuse, (2000), *Manusia Satu Dimensi*. terj. SG. Sukur dan Yusup P., Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Theodore Adorno dan Max Horkheimer, (2014), *Dialektika Pencerahan: Mencari Identitas Manusia Rasional*, Yogyakarta: Ircisod.
- Komaruddin Hidayat dan M. Wahyuni Nafis, (2003), *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thomas S. Kuhn, (2005), *The Structure of Scientific Revolutions*. terj. T. Sujarman. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- George Ritzer, (1993), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Peny. Alimandan. Jakarta: CV. Rajawali.
- Jurgen Habermas, (1997), “Modernity: An Unfinished Project”, dalam Mauricio d’Entrevos dan Seyla Benhabib, ed, *Habermas and the Unfinished Project of Modernity*. Cambridge and Mass: The MIT Press.
- Barry Stocker, (2006), *Derrida on Deconstruction*. New York: Routledge
- James K.A. (2005), Smith, *Jacques Derrida: Live Theory*, New York: Continuum.
- Nicholas Royle, (2003), *Jacques Derrida*, London: Routledge.
- Jurgen Habermas, (1971), *Knowledge and Human Interest*. Boston: Beacon Press, 1971.
- F. Budi Hardiman, (1993), *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Herbert Marcuse, (1973), *Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Alan How, (2003), *Critical Theory*, New York: Palgrave Macmillan.
- Andrew Wernick, (2001), *Auguste Comte and the Religion of Humanity: The Post Theistic Program of French Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- John B. Thompson, (1984), *Studies in the Theory of Ideology*. California: The University of California Press.
- W.W. Rostow, (1991), *The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Samuel P. Huntington, (1968), *Political Order in Changing Societies* New Haven: Yale University Press.
- AS. Hornby, (1987), *Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English*. New York: Oxford University Press.
- Zuhairin, ed, (2009), *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramayulis dan Samsul Nizar, (2010), *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hamid Dabashi, (2008), *Islamic Theology Liberation: Resisting the Empire* (London and New York: Routledge.
- Asghar Ali Engineer, (2003), *Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Iswahyudi, (2011), *Nalar Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer*, dalam Wasid,dkk, *Menaafsirkan Tradisi dan Modernitas: Ide-ide Pembaruan Islam* (Surabaya: Pustaka Idea).